Dijegal BMAD, Ekspor Tekstil Ke Turki Turun 49%

Tanggal	: Rabu , 28 Oktober 2020
Media	: Investor Daily
Halaman	: 7
Wartawan	: Sanya Dinda
Muatan Berita	: Netral
Narasumber	: Jemmy Kartiwa *(Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API))*, Marthin Kalit *(Sekretaris Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag))*
Rubrik	: Industries, Trade & Services
Topik	: Ekspor Tekstil

Dijegal BMAD, Ekspor Tekstil ke Turki Turun 49%

Oleh **Sanya Dinda**

JAKARTA - Ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional ke Turki turun 49% sepanjang Januari-Agustus 2020 menjadi US$ 168,9 juta, dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar US$ 336 juta. Hal itu dipicu penerapan bea masuk antidumping (BMAD) oleh Turki terhadap impor tekstil asal dan pandemi Covid-19.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menuturkan, Turki menerapkan instrumen *trade remedies* dalam bentuk BMAD terhadap produk tekstil Indonesia, India, dan Tiongkok, karena dituduh membanting harga jual (dumping). Produk tekstil Indonesia yang banyak dipasok ke negara itu adalah *man-made stable fibre* (HS 55). Ekspor produk ini ambles menjadi US$ 100 juta pada 2019, dibandingkan 2017 US$ 120 juta.

BMAD, kata dia, diterapkan bersamaan dengan tarif umum atau *most favoured nations* (MFN). Dengan BMAD, tarif bea masuk (BM) impor tekstil bertambah US$ 0,1- US$ 0,3 per kilogram (kg) pada 2019 dan 2020, sedangkan 2021-2022 turun menjadi berkisar US$ 0,08-0,28 per kg.

"Selama ini, Turki merupakan tujuan ekspor terbesar produk *spurn yarn* Indonesia dan akan terus menjadi pasar yang penting. Tetapi, pada 2018, Turki mengenakan BMAD untuk impor semua bentuk *spurn yarn* dengan besaran US$ 0,23-0,4 per kilogram," kata Jemmy Kartiwa dalam webinar *Ekspor Produk Tekstil ke Turki: Tantangan dan Peluang*, Selasa (27/10).

Pemerintah Turki, kata dia, juga telah dua kali melakukan penyelidikan kembali (*sunset review*) atas BMAD impor tekstil Indonesia, yakni pada 2014 dan 2018. Pada 17 April 2015, otoritas Turki memutuskan memperpanjang pengenaan BMAD dengan besaran yang sama. Sementara itu, pada 2018, otoritas Turki memutuskan memperpanjang BMAD selama lima tahun hingga 22 Mei 2025.

Tarif BMAD yang dikenakan Turki berbeda antara negara satu dan lain. Tiongkok, misalnya, dikenakan tarif BMAD US$ 0,49 dan US$ 0,8 per kg, sedangkan Indonesia dikenakan MFN sebesar 4-8% dan untuk perusahaan kooperatif tarif BMAD-nya US$ 0,23-0,25 per kg. Adapun perusahaan atau eksportir lain tarif BMAD-nya US$ 0,4 per kg.

Dia menambahkan, untuk menghadapi *trade remedies* Turki, API mengajak anggota baik perusahaan tertuduh maupun bukan, bersama-sama menghadapi tuduhan dumping. API juga mengimbau perusahaan yang terlibat selalu kooperatif dan mengikuti keseluruhan proses penyelesaian. API juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan setiap tuduhan.

Jemmy Kartiwa

"Dalam menghadapai Indonesia-Turki CEPA, kami menyarankan strategi yang bisa diterapkan pemerintah untuk menyamakan level bermain Indonesia melalui perbaikan aturan dan iklim industri untuk meningkatkan daya saing. Dengan adanya *omnibus law*, harapannya bisa menyederhanakan aturan, sehingga daya saing industri TPT bisa meningkat," imbuh Jemmy.

Perjanjian Dagang

Di sisi lain, pemerintah saat ini menegosiasikan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif (*comprehensive economic partnership agreement*/CEPA) dengan Turki. Pemerintah melobi Turki untuk tidak memberikan tarif tambahan kepada produk tekstil Indonesia. Selain itu, pemerintah sedang melakukan pemesanan produk yang dibutuhkan oleh Turki.

Sekretaris Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Marthin Kalit mengatakan, karena letak geografisnya, Turki merupakan pasar ekspor yang penting. Turki dapat menjembatani produk Indonesia yang hendak masuk ke Eropa dan Timur Tengah.

Selain itu, dia menuturkan, Turki merupakan negara produsen tekstil dan garmen nomor enam dunia dan utama di Eropa. Indonesia bisa masuk ke rantai pasokan dengan menyediakan bahan baku produk tekstil.

Hanya saja, menurut Marthin, sejak pertengahan 2014, Turki sudah menerapkan tarif BM rata-rata 26% untuk berbagai produk, termasuk produk tekstil, guna melindungi industri dalam negeri mereka. Di tengah pandemi, Turki pelan-pelan mengerek tarif BM. Sebab, hanya 50,5% dari total tarif BM impor Turki yang dikaitkan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation/WTO). Alhasil, negara yang belum memiliki perjanjian dagang dengan Turki sulit melakukan gugatan.

"Di samping instrumen tarif, Turki menerapkan instrumen non-tarif dan *trade remedies*. Turki dapat disebut sebagai salah satu negara yang menggunakan instrumen ini dan cukup intensif menggunakannya. Berdasarkan data World Integrated Trade Solution, Turki masuk 10 besar negara di dunia yang paling banyak menerapkan instrumen ini," imbuh Marthin.